



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RITA YUANIK
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 782076

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.678.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 345.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/150 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
5. Tanah Seluas 2.381 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 645.000.000
6. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **250.000.000**

1. MOBIL, ISUZU PANTHER PICK-UP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



4. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1 Tahun 2022, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	45.000.000
Sub Total	Rp.	1.978.000.000
III. HUTANG	Rp.	588.887.668
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.389.112.332

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.